

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERKENDARAAN

(Studi Kasus Putusan No :1508/Pid.B/2012/PN.MKS)

OLEH
ILHAM ANIAH
B 111 09134

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM BERKENDARAAN**

(Studi Kasus Putusan No :1508/Pid.B/2012/PN.MKS)

**OLEH
ILHAM ANIAH
B 111 09134**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERKENDARAAN

(Studi Kasus Putusan No :1508/Pid.B/2012/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

ILHAM ANIAH


B 111 09134

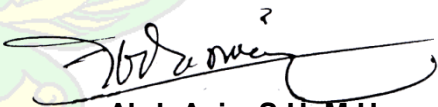
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 24 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

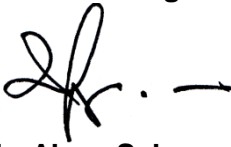
Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.
NIP.19590317 198703 1 002


Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP.19620618 198903

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : ILHAM ANIAH
Nomor Induk : B111 09 134
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kelalaian Dalam Berkendaraan
(Studi Kasus Putusan No :1508/Pid.B/2012/
PN.MKS).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

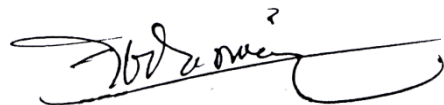
Makassar, Januari 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP.19590317 198703 1 002



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP.19620618 198903

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ILHAM ANIAH
Nomor Induk : B111 09 134
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kelalaian Dalam Berkendaraan
(Studi Kasus Putusan No :1508/Pid.B/2012/
PN.MKS).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Makassar, Februari 2014

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademi



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 00

ABSTRAK

ILHAM ANIAH (B11109134) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berkendaraan. Dibawah bimbingan Bapak **Muhadar** sebagai pembimbing I dan Bapak **Abdul Asis** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan nomor : 1508/Pid.B/2012/PN.MKS dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan nomor : 1508/Pid.B/2012/PN.MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara (interview) kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani tindak pidana ini; antara lain hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini, serta teknik kepustakaan dengan cara menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang dalam perkara putusan nomor: 1508/Pid.B.2012/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keteangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti. Dakwaan tunggal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum yang mendakwakan Pasal 310 ayat 4 (empat) UU No.22 tahun 2009, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kurang tepat karena tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya itu. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam melakukan menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan nomor: 1508/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERKENDARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO :1508/Pid.B/2012/PN.MKS)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatallilalamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda **H. Iskandar,S.H.,MBA.** yang selalu menjadi panutan penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan kebenaran dan Ibunda **Hj. Asni. S.Si.,Apt.**, atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bias membalasnya.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.S.** dan Bapak **Abd. Asis,S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bimbingan,

arahan, perhatiannya dan dengan penuh kesabaran ketulusan yang diberikan kepada penulis.

3. Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si.** selaku penguji I, Bapak **H. M. Imran Arief, S.H., M.H.** selaku penguji II, dan Bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku penguji III.
4. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo.,** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan II, Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku terkhusus buat Laode Ridwan Muri, Adnan Darmansyah, Febry Andika Asrul, Manguluang, Mursyid Surya Candra, Yudha Arfandi, Sarif Febriansyah, , Andi Putratama H. A., M. Meidiaz Ismail, Muh. Alif Alfianto, Abdul Kadir Pobela, Rizky Andriarsyah Hasbi, Charles Willem Pupela, Rio Andriano Tangkau, Arfin Bahter, Akbar Tenri Tetta P., Andika Martanto, Muh. Iqbal Arvadly, Muh. Mustika Alam, Andildjo Aidit Dien, Dio Dyantara, Muh. Rezkyawal Saldy Putra, Lukman Hakim Adam, Farid Wahyu Perdana, Fadli Sukarta *Amicisicut fratres, vivat constanter Dojosquad.*
7. Tersayang buat saudara-saudaraku, Ade Asnandar, Nur Afifah, yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Hasanuddin Law Study Centre dan seluruh organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak pelajaran kepada penulis

9. Teman-teman DOKTRIN 09 dan seluruh mahasiswa Fak. Hukum serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

10. Dan terkhusus untuk “AMASKOA” yang selama ini menampilkan pemandangan yang eksotis dan sejuta bintang yang sulit untuk digambarkan serta sejuta momen yang menciptakan canda dan tawa yang tak terlupa sehingga membuat penulis rileks dalam menyelesaikan skripsi ini

11.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana	10
3. Cara atau teknik merumuskan tindak pidana	17
B. Delik	24
1. Pengertian Delik	24
2. Unsur Delik.....	25
C. Kesalahan.....	26
1. Dolus	27
2. Culpa.....	28
D. Pengemudi dan Kendaraan Umum	39
1. Defenisi Pengemudi	39
2. Defenisi Kendaraan Umum.....	39
E. Ketentuan Pidana Perbuatan yang Menghilangkan Nyawa orang Lain	41

F. Batas Kecepatan Maksimal dan Minimum Kendaraan Bermotor.....	44
G. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendaraan dalam Putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.Mks	51
1. Posisi Kasus.....	52
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	53
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Amar Putusan.....	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendaraan dalam Putusan No. 1508/Pid.B/2012/Pn.Mks	60
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
2. Analisis Penulis	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, Berita tanggal 1 September 2012 menyatakan bahwa berdasarkan data dari National Traffic Management Center Polri, tahun ini terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas, 760 orang luka berat, dan 1.914 orang luka ringan. Pada 2010, sesuai data yang dicuplik dari buku "Mudik Asyik" yang dikeluarkan Mabes Polri, jumlah kecelakaan selama sepekan arus mudik sebanyak 927. Korban tewas sebanyak 182 orang, luka ringan 497 orang, dan luka berat 261 orang (*liputan6.com*, 4 2013). Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut

tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJR). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

- Pasal 105 UULAJR yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
 - a. Berperilaku tertib; dan/atau
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
- Pasal 106 UULLAJR, yang berbunyi:
 - 1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - 2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
 - 3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
 - 4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;

- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dengan adanya suatu peraturan yang tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan diatas dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur pada Pasal 310 UULLAJR yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara palig lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan no.1508/Pid.B/2012/PN.MKS

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan no: 1508/Pid.B/2012/PN.MKS
2. Untuk mengetahui bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan no.1508/Pid.B/2012/PN.MKS

Adapun kegunaan yang kami harapkan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materiil pada umumnya.

2. Agar hasil penelitian skripsi ini dapat di jadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
3. Agar hasil penelitian skripsi ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan UU menggunakan istilah “ tindak pidana “ untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “*Strafbaar Feit*” (belanda). Sedangkan dari tinjauan etimologi, menggunakan istilah “delik” yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “*delictum*” atau “*delicti*”. Dalam bahasa jerman digunakan istilah “*strafbare handlung*” sedangkan Inggris dan Amerika menggunakan istilah “*crime*” dan jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti peristiwa atau (perbuatan) yang dapat di pidana. Perkataan “ *feit* ” itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “perbuatan” sedang “*straafbaar*” berarti “dapat di hukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat di terjemahkan sebagai “perbuatan yang dapat di hukum”.(Moeljatno,2002 : 16)

Oleh karena pembentuk UU tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan “*starbaar feit*”, maka timbullah berbagai pendapat apa sebenarnya yang di maksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut, sebagai berikut :

- **Hazewinkel Suringa (Lamintang, 1997 : 181)** pengertian

“*strafbaar feit*” secara umum adalah :

“sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

- **Pompe (Lamintang, 1997:182)** pengertian “*strafbaar feit*” adalah :

“suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak di sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

- **Simons (Lamintang, 1997:185)** merumuskan “*strafbaar feit*”

sebagai berikut :

“suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.

Menurut **Simons** apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu di rumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu “*strafbaar feit*” itu di isyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang di larang ataupun di wajibkan oleh Undang-undang, dimana Pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah di nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
 - b. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsru dari delik seperti yang di rumuskan di dalam undang-undang.
 - c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *orechtmatige handeling*.
- **Zainal Abidin Farid (1986;146)** berpendapat, bahwa istilah yang paling tepat yang di gunakan adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicti*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya :
2. Bersifat ekonomis karena singkat :
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti istilah “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, (bukan peristiwa, perbuatan yang di pidana tetapi pelakunya) ;
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh koorperasi, orang mati, orang yang tidak di kenal, menurut Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia.

Lain lagi dengan istilah yang di gunakan oleh Rusli Efendy (1980;46), beliau berpendapat bahwa “istilah peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa saja melanggar larangan tersebut untuk ini kita sebut peristiwa pidana”.

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah bahwa tidak seorangpun dapat di hukum kemudian apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah di lakukan berdasarkan sesuatu untuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak di sengaja. Sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya “*wederrechtelijkheid*”. Dengan demikian sesuaiilah sudah apabila pendapat menurut teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau tidak ada sesuatu hukuman yang dapat di jatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, yang berlaku bagi teori maupun hukum positif.

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan juga harus ada suatu “*strafbaar person*” atau seseorang yang dapat di hukum, dimana orang

tersebut tidak dapat di hukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah dilakukan itu tidak bersifat “*wederrechtelijk*” dan yang telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Unsur-unsur atau Elemen-Element Perbuatan Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. (Moeljatno, 2002 : 25)

Di samping :

- a. *kelakuan dan akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya di perlukan pula adanya
- b. *hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan*, hak ikhwal mana oleh van Hamel di bagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.

Contoh-contoh dari yang pertama adalah: hal menjadi pejabat Negara (pegawai negeri) yang di perlukan dalam delik jabatan seperti dalam pasal 413 KUHPidana dan seterusnya (yang terkenal: 418, 419). Kalau hal menjadinya pejabat Negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya: Hal menjadi ibu dari anak yang di bunuh dalam Pasal 341 KUHPidana; hal yang menjadi pengusaha (*koopman*) dalam Pasal 396 dan seterusnya. (merugikan para penagih). Contoh: dari golongan ke-2 adalah misalnya dalam

Pasal 160 KUHPidana, Penghasutan harus di lakukan: di tempat umum. Dalam Pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) di sebut bahwa perbuatan itu harus di setuju oleh wanita yang di lirikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya.

Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, di jumpai pula adanya *hal ikhwal tambahan yang tertentu pula*; misalnya dalam Pasal 164 KUHPidana yang tertentu, di jumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula; misalnya dalam Pasal 164, 165 KUHPidana: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

Pasal 331 KUHPidana Keharusan member pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian lalu meninggal. Hal ikhwal tambahan yang tertentu seperti di contohkan di atas dalam buku-buku Belanda di namakan "*Bijkomendevoorwaarden van strafbaarheid*", yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat di pidananya (*strafbaar*) seseorang.

Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan: *unsur tambahan*,

karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sangsi pidana.

Sekarang soalnya ialah apakah hal ikhwal tambahan tadi sungguh merupakan elemen atau unsur perbuatan pidana? Banyak penulis Belanda rupanya berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan elemen *strafbaar feit*, sekalipun tambahan. Meskipun demikian, hemat saya hal tersebut tidak perlu kita oper begitu saja untuk perbuatan pidana, lebih-lebih bahwa di antara mereka yang tidak memandangnya sebagai elemen *strafbaar feit* adalah misalnya **Van Hamel**, menurut beliau ini, syarat tambahan tadi tidak mengenai *strafbaar heid*, sebab tidaklah mungkin bahwa suatu keadaan yang demikian tadi menghilangkan sifat tersebut. Yang mungkin ialah bagi pembuat undang-undang untuk menentukan bahwa perbuatan yang dilarang tadi menjadi "*strafwaarding*" yaitu patut dipidana.

Menurut **Simons** syarat tambahan tersebut tidak di pandang sebagai elemen *strafbaar feit* yang sesungguhnya. Maka dari itu, bertalian dengan pendapat-pendapat di atas, saya lebih condong untuk memandangnya bukan sebagai elemen perbuatan pidana, *tapi sebagai syarat penuntutan*, artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk

mendatangkan sangsi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi. Karenanya, dalam pasal-pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu, di keluarkan dari rumusan tersebut, dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri semacam Pasal 319 KUHPidana, yaitu mengenai syarat penuntutan bagi penghinaan.

Kemudian perlu di ketahui juga bahwa ada keadaan keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah di lakukan perbuatan yang tertentu tapi tidak merupakan "*bijkomendevoorwaarde van strafbaarfeid*" seperti di atas. Berbeda dengan hal di atas, di sini tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwan telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat di tuntutan untuk di jatuhi pidana sebagaimanadiancamkan. Tapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.

- c. karena keadaan tambahan tersebut di namakan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Contoh: penganiayaan menurut Pasal 351 KUHPidana di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 ayat 2 dan 3). Contoh lain adalah Pasal 291 ayat 2 dimana diancamkan kepada pelanggar kesusilaan yang

tertentu yang mengakibatkan matinya si korban, pidana penjara maksimum lima belas tahun. Lihat pula Pasal 211 dan 212 dan lain-lain. Hemat saya ini merupakan unsur perbuatan pidana.

- d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsure tersendiri. Contohnya; dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa di tambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Pasal 277 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal-usul orang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut sudah jelas, tak perlu di tambah apa-apa lagi. Dalam Pasal 285 KUHPidana yaitu tentang perkosaan, di tentukan bahwa memaksa seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh di luar perkawinan, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Juga di sini dari rumusan telah ternyata sifat melawan hukumnya perbuatan.

Akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsure-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang di pakai orang lain itu saja di pandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan. Harus di tambah dengan unsur: secara melawan hukum. Begitu pula dalam Pasal 335 KUHPidana di mana rumusan: memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan cara-cara yang tertentu di anggap belum cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga perlu di adakan elemen melawan hukum tersendiri yaitu dalam kata-kata secara melawan hukum, memaksa dan seterusnya. Juga dalam Pasal 406 KUHPidana demikian halnya,

- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjukan kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 167 KUHPidana, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan. Dalam Pasal 335 KUHPidana, bahwa terdakwa tidak

ada wewenang untuk berbuat begitu, sebab terdakwa tidak utang kepadanya serta tidak melakukan perbuatan apa-apa yang mengakibatkan bahwa pemaksaan patut dilakukan. Dalam Pasal 406 KUHPidana, yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan ternyata dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tak dapat izin dari pemiliknya dan tak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, *tetapi pada keadaan subyektif*, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana. Disini di rumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan pada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari pada sikap batin terdakwa. Jadi merupakan unsur subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektief onrechtselement*" yaitu unsure melawan hukum yang subyektif.

Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif ini relatif belum lama dan pertama timbul di Jerman. Menurut **Mezger**, hal itu adalah buah usaha orang-orang seperti **Von Weber Welel**, **Maurach** dan **Busch**.

Jadi untuk menyimpulkan bahwa apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsure atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan di kira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata di atas, perbuatan tadi *sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya*, sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

Akhirnya ditekankan; bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melaawan hukum subyektif.

3. Cara atau tekhnik merumuskan tindak pidana

Jika kita melihat buku II dan III KUHPidana maka di situ dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sangsinya yang dimaksud untuk menunjukan perbuatan-perbuatan yang mana dilarang

dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai: mengambil barang orang lain. Tetapi tidak tiap-tiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk di simpan kemudian di serahkan kepada pemiliknya.

Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 KUHPidana disamping unsur-unsur tadi, ditambah dengan elemen elemen lain yaitu: dengan dimaksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Jadi rumusan pencurian dalam Pasal 362 tadi terdiri atas unsur-unsur:

1. Mengambil barang orang lain dan
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Begitu pula misalnya dengan penadahan (*heling*). Dalam Pasal 480 ke-1 di rumuskan dengan unsur-unsur 1, membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menjual untuk mendapatkan untung, mengganti menerima sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang dan 2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Dalam Pasal 480 ke-2 rumusannya adalah:

1. Menarik untung dari hasil hasil sesuatu barang, dan
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Akan tetapi cara untuk mengupas perbuatan yang dilarang menjadi beberapa elemen atau unsur seperti di atas, tidak perlu dapat dilakukan. Ada kalanya hal itu disebabkan karena pengupasan semacam itu belum mungkin, atau dianggap kurang baik pada saat membikin aturan, sehingga pengertian yang umum dari perbuatan yang dilarang saja yang dicantumkan dalam rumusan delik, sedangkan batas-batasnya pengertian tadi diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Contoh-contoh dari cara ini adalah Pasal 351 yaitu: penganiayaan, dan Pasal 297 yaitu perdagangan wanita (*vrouwenhandel*).

Mengenai penganiayaan, dalam teori pengertian tersebut telah dikupas menjadi: menimbulkan nestapa (*leed*) atau rasa sakit (*pijn*) pada orang lain. Tapi mengenai perdagangan wanita, batas-batas pengertiannya hingga sekarang belum diketemukan. Karena hanya ditentukan pengertian umum saja, maka cara merumuskan perbuatan pidana semacam ini, dikatakan memberi kualifikasinya perbuatan saja.

Kebanyakan kali, dalam KUHPidana selain dari menentukan unsur-unsurnya perbuatan yang dilarang, di situ juga diberi kualifikasinya perbuatan. Misalnya dalam Pasal 362 dan 480 tadi, di samping penentuan elemen-elemennya, juga di tentukan bahwa kualifikasinya adalah “pencurian” dan “penadahan”.

Bertalian dengan cara yang demikian ini, maka diajukan soal, apakah dalam hal demikian, kualifikasi harus dipandang sebagai singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan di situ, ataukah juga mempunyai arti tersendiri, lepas dari penentuan unsur-unsur,

sehingga ada dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan menurut unsur-unsurnya, dan pengertian yang umum (*kualifikasi*).

Dalam teori hal itu menjadi persoalan, kalau ada orang yang kecurian suatu barang, kemudian orang tadi pergi ketempat loak, melihat barangnya di situ, serta membeli barang tadi kembali, apakah orang itu juga dapat di tuntutan karena Pasal 480 ? menurut unsur-unsurnya perbuatannya masuk dalam Pasal tersebut, sebab dia membeli barang yang diketahuinya berasal dari kejahatan. Tapi bertalian dengan itu ada juga yang mengatakan: bahwa orang tadi sesungguhnya tidak “membeli” barang tersebut, sebab barang sendiri, sehingga tidak mungkin dinamakan penadahan. Jadi tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 480, sekalipun unsur-unsurnya telah di penuhi.

Dalam hal-hal yang khusus, pemberian arti tersendiri kepada kualifikasi berdasar atas alasan-alasan rasionil, dapat mencegah pengenaan suatu delik pada perbuatan-perbuatan yang tidak dimaksudkan. Akan tetapi janganlah pengertian tersendiri dari kualifikasi itu, digunakan secara “*phaenomenologis*”, yaitu meskipun perbuatan telah memenuhi unsur-unsur delik, tapi tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi, dengan alasan bahwa perbuatan itu “*dem wesem nach*” (menurut hakekatnya) memang tidak masuk dalam kualifikasi tersebut. Jadi tanpa di beri alasan rasional apapun, halnya atas “perasaan” saja. Contoh: seorang Hitler- jugend merebut bendera dari tangan pemuda katholik (pada zaman nazi). Dikatakan, bahwa perbuatan tersebut bukan pencurian, karena pencuri itu bukan pencurian, karena pencuri itu tidak

mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, akan tetapi pencuri adalah orang yang “*dem wesen nach dieb ist*” (orang yang menurut hakekatnya adalah pencuri).

Dalam menghadapi pertentangan antara pengertian rumusan delik dalam unsure-unsur yang ditentukan dalam wet dan pengertian kualifikasi ini, hemat saya dapat diterima nasehat seorang penulis Belanda (vos. Hlm. 36) yang mengatakan bahwa dalam banyak hal, pertentangan itu dapat di atasi, jika kita berpendapat bahwa sifat melawan hukum itu adalah unsur mutlak dari tiap-tiap, dan sifat melawan hukum itu di pandang secara material (*materieelwederrechtelijkheid*) apa artinya ini diterangkan nanti kalau menghadapi masalah tersebut. Perumusan delik dapat dilakukan secara formal dan materiil, dapat disebut delik formal dan materiil.

Jadi dalam kenyataan tidak ada perbedaan sifat antara delik formil dan materiil. Perbedaan hanya dalam tulisan yaitu bias dilihat kalau membaca perumusan masing-masing delik, dari: delik yang dirumuskan secara formal atau materiil. Dikatakan ada perumusan formal jika yang disebut atau menjadi pokok dalam formulering adalah kelakuannya. Sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Akibatnya dari kelakuan itu tidak dianggap penting untuk masuk perumusan. Misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana mengenai pencurian, yang penting ialah kelakuan untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri. Dalam pasal itu kelakuan di rumuskan sebagai “mengambil”. Akibat dari pengambilan tadi, misalnya dalam pencurian sepeda, bahwa si

korban lalu harus jalan kaki sehingga jatuh sakit, tidak dipandang penting dalam formulering dalam pencurian.

Dikatakan ada perumusan materiil jika yang disebut atau menjadi pokok dalam formulering adalah akibatnya: oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.

Bagaimana caranya mendatangkan akibat tadi tidak dianggap penting?

Biasanya yang dianggap delik materiil adalah misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dan pembunuhan (Pasal 358 KUHPidana) karena yang dianggap pokok untuk dilarang adalah adanya akibat menderita sakit atau matinya orang yang dianiyaya atau dibunuh. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.

Perlu diajukan pula, bahwa hemat saja ada rumusan-rumusan yang formal-material. Artinya di situ yang menjadi pokok bukan saja cara berbuat tapi juga akibatnya. Contoh-contohnya adalah Pasal 378 KUHPidana yaitu penipuan.

Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau member utang maupun menghapuskan piutang, mengingatkan pada rumusan yang materiil. Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan hati orang yang ditipu, masuk dalam pengertian penipuan menurut pasal diatas. Hanya kalau caranya menggerakkan hati itu, memakai nama palsu, martabat menurut Pasal 378 KUHPidana Disini terang adalah rumusan formal.

Mungkin ada orang bertanya kalau memang hanya mengenai perumusan delik saja, apakah perlunya diadakan perbedaan. Jawabnya ialah: oleh karena perbedaan perumusan itu di satu pihak mempunyai konsekuensi lain dalam pembuktian; di lain pihak, dan bertalian dengan yang pertama berlainan juga pengaruhnya kepada masyarakat apakah suatu perbuatan yang perlu dilarang dengan sangsi pidana di rumuskan secara formil atau materiil. Hal ini ternyata dalam sejarahnya Pasal 154 KUHPidana, yang dulunya di rumuskan secara materiil, dan kemudian untuk memudahkan pembuktian diubah menjadi formal.

Dahulu perumusan pasal tersebut adalah: menimbulkan atau mempermudah timbulnya (*opwekken of bevorderen*) perasaan permusuan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintahan Belanda. Jadi suatu akibat tertentu yang dilarang (*materiil*). Dalam Tahun 1918 di ganti dengan: di muka umum mengatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia-Belanda (*formal*). Kalau sudah dibuktikan bahwa terdakwa dimuka umum menyatakan perasaan seperti tersebut di atas, sudah cukup untuk adanya perbuatan pidana tadi. Dahulu harus di buktikan adanya perasaan permusuhan kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah di kalangan penduduk. Kemudian harus dibuktikan bahwa perasaan itu disebabkan karena perbuatan terdakwa, hal-hal mana tentunya sangat sukar.

B. Delik

1. Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu *delict*, *delicta* atau *delictum*. Delik merupakan istilah tehnik yuridis yang hingga saat ini dikalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesian, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang banyak digunakan oleh sarjana hukum, diantaranya yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan mengenai istilah *strafbaarfeit* disebabkan belum ada terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht* dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. A. Zainal Abidin Farid (1983: 4) memakai istilah peristiwa pidana, belum menyetujui kalau perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana, karena berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.

- **Moeljatno, (Rusli Effendy, 1980: 47)** merumuskan delik adalah
“perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.
- **Rusli Effendy, (1980: 55)** merumuskan peristiwa pidana adalah:
“suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, sebabnya saya memakai hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis”.
- **Tresna (Rusli Effendy, 1980: 53)** merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:

“Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pemidanaan.”

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Unsur Delik

Pandangan monistis, (**Andi Zainal Abidin Farid, 1983: 46**) merumuskan bahwa :

“semua unsure pidana adalah sama dengan syarat pemidanaan orang yang melakukan peristiwa pidana dengan memperhatikan semua unsurperistiwa pidana”.

Adapun unsur-unsur delik menurut pandangan Monistis, (**Andi Zainal Abidin Farid, 1983: 47**) adalah:

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Adanya sifat melawan hukum
- c. Tidak ada dasar pemaaf
- d. Adanya kesalahan yang meliputi dolus dan culpa.

Selanjutnya menurut aliran dualistis, (**Andi Zainal Abidin Farid, 1983: 47**) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-Undang)
- b. Perbuatan itu melawan hukum
- c. Tidak dasar pembeda

Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur perbuatan dan unsur perbuatan.

1. Unsur pembuatan meliputi:
 - a. Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Unsur perbuatan meliputi:
 - a. Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembeda

Pemisahan antara unsur pembuat dengan dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan tehnik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pembedaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistik.

C. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang yang mampu mempertanggung jawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat di persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya.

Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu:

1. Pembuat harus melawan hukum,
2. Harus ada kesalahan Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu:
 - a. Sengaja (dolus)
 - b. Kelalaian (culpa)

Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

1. Dolus

Rusli Effendy (1989: 80), menuliskan dolus atau sengaja menurut Memorie Van Teolichting (Risalah penjelasan Undang-Undang) berarti si Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya).

Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan dan belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori membayangkan (Voortellings theory) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
2. Teori kemauan (wills theory) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.

Jonkers (Rusli Effendy 1989: 80) sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan.

Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Adanya perangsang,
2. Adanya kehendak,
3. Adanya tindakan.

2. Culpa

a. Pengertian Culpa

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa.

Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi

Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan

- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari

Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati” untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “kekurang hati-hatian”, “kurangnya perhatian” seperti yang dimaksud di atas, para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Pompe misalnya, telah menggunakan istilah “*onachtzaamheid*”, sedangkan Simons telah menggunakan istilah-istilah “*gemis aan voorzichtigheid*” dan “*gemis aan voorzienbaarheid*”. Van Bemmelen telah menggunakan istilah “*roekeloos*”

Sactohid Kartanegara (**Sri Widyastuti 2005: 40**) merumuskan delik culpa seiring dengan Culpouse Delicten yaitu:

“Tindak-tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuse delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. culpouse delicten adalah delik yang mempunyai unsure culpa atau kesalahan (*Schuld*).”

Contoh:

- Pasal 359 KUHPidana

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

- Pasal 188 KUHPidana

Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-, jika terjadi bahaya kepadamu orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Lamintang (1997: 204) mengemukakan tentang delik culpa adalah:

“Culpose delictenatau delik yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut terjadi dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum”.

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik culpa yang berdiri sendiri. Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal-pasal 188. 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (vide di atas) juga sering disebut sebagai *delict culpoos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpoos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsure tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik culpa yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen culpa, yang ditempatkan sesudah opzet dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyaf dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan

pidana terhadap delik culpa, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesamaanggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus berjanggungjawab dengan mendapat pidana.

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja (*tidak diinsyafi*) akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peratran hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik culpapada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentukkesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

b. Jenis-jenis Culpa

Culpa dibedakan menjadikan culpa levissima dan culpa lata. Culpa levissima atau lichtste schuld, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa late atau merkelijke schuld, grove schuld artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya culpa levissima para ahli

menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levissima oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa latadipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunya arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan.

Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Anrata lain oleh **Vos (Bambang Poernomo 1992: 174)** dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (voorzien-baarheid);
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzichtigheid).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang.

Kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh **Vos (Bambang Poenormo 1992: 175)**, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatanyapada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercondengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari culpaini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadaka penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan culpa, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan culpa, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, karena barang siapa melakukan

perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti implicit tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut Memorie van Toelichting atau risalah penjelasan Undang-Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, **Rusli Effendy (1989: 85)** Jurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati".

c. Jenis-Jenis Culpa Lata

Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik kulpa di atas, yakni delik yang di dalamnya terdapat unsure kurang kehati-hatian, maka culpa lata tersebut mempunyai corak tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid, (1981: 228) menyimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang mengakui corak dari culpa lata yaitu:

- a. Culpa lata yang diinsyafi atau disadari (*Bewuste Schuld*) Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah.
- b. Culpa lata yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*) Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.

Di dalam KUHPidana tidak terdapat pembagiannya, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). *Bewuste schuld* sukar dibedakan dengan *voorwaardelijk opzet*, karena keduanya dapat digambarkan sebagai seorang pembuat delik yang telah membayangkan akibat yang akan terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga. Pada *onbewuste schuld* terhadap si pembuat dalam berbuat tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia membayangkannya.

Jonkers (Bambang Poenomo 1992: 174), memberikan contoh bahwa

“seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi ditempat lain itu ia mengetahui ada orang sakit yang keadaanya sedemikian rupasehingga akan meninggal apabila terkejut”.

Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaannya ditunjukan kepada kematian orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari (*bewuste sculd*) diberikan contoh mengadakan perta di dalam ruangan yang banyak mempergunakan penerangan di dekat bahan yang mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan

alat pemadam api, maka kebakaran yang tidak dikehendaki itu apabila terjadi merupakan kealpaan yang disadari karena orang itu insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari adalah melempar barang di luar gudang tanpa memikirkan kemungkinan bahwa orang lain akan selalu di situ, maka kealpaanya karena kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka yang seharusnya diingat kemungkinan itu. Demikian terjadinya kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan (kemungkinan/ bersyarat), akan tetapi dapat pula terjadi kealpaan yang sedemikian ringannya sehingga tidak mudah dibedakan dengan peristiwa biasa yang kebetulan, yang perlu atau tidaknya celaan yuridis.

d. Perbedaan Antara Dolus Eventualis dengan Culpa lata

Dolus Eventualis adalah termasuk kedalam jenis deli dolus yakni delik yang didalamnya terdapat unsure kesengajaan. Kesengajaan disini mempunyai 3 tingkata sebagaimana yang dikemukakan **Rusli Effendy (1989: 81)** yaitu:

1. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk adanya suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan dilakukan. Misalnya A berniat membunuh B, lalu A menembaknya.
2. Sengaja kesadaran akan kepastian: adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. Jonkers memberikan contoh sebagai berikut: A hendak menembak mati B yang duduk dibelakan kaca. Untuk mengenai sasarannya itu maka A harus menembak kaca itu sehingga pecah. A bersalah selain daripada membunuh (sengaja sebagai niat) juga telah dengan sengaja merusak barang (kesadaran akan kepastian). Walaupun niatnya hanya membunuh B tetapi ia juga menembak kaca itu untuk mencapai maksudnya. A mengetahui bahwa perbuatan (membunuh) bertalian dengan memecahkan kaca.

3. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu.

Mengenai Dolus Eventualis ini, **Moeljatno (1983: 175)**

mengemukakan sebagai berikut:

“Teori yang dikenal sebagai inkauf nehmen adalah teori mengenai dolus eventualis bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima”.

Andi Zainal Abidin Fadird (1981: 217) menggunakan istilah teori apa boleh buat sebagai terjemahan dari inkauf nehmen. Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat:

- a. Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik,
- b. Sikap tentang kemungkinan itu andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya. Mengenai syarat pertama, hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan mengenai syarat yang kedua, hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan tersebut.

Sebagai contoh sengaja insyaf akan kemungkinan, Utrecht (Sri Widyastuti 2005: 42) dapat disebut keputusan HOF Amserdam tertanggal 9 maret 1911 W.Nr. 9154 dan putusan Hoogeraad tertanggal 19 juni 1911 W.Nr. 9203, yang paling terkenal dengan Hoorensche tart Arrest kasusnya:

A hendak membalas dendam terhadap B di kota Hoorn. Dari kota Amsterdam A mengirim sebuah kue tar ke alamat B, dan dalam kue tersebut telah dibumbuhi racun. A insyaf akan kemungkinan besar bahwa isteri B turut serta memakan kue tersebut. Walau A tahu bahwa isteri B

diluar dari perselisihannya dengan B, tetapi masih juga A tidak menghiraukan hal hidupnya isteri B. Oleh Hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap isteri B juga dilakukan dengan sengaja, meskipun matinya isteri B tidak dikehendaki oleh A Sactohid Kartanegara **(Sri Widyastuti 2005: 43)** mengemukakan dasar perbedaan antara dolus dan culpa sebagai berikut:

1. Dolus
 - a. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
 - b. Perbuatan itu disebut Doluse delicten
 - c. Diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada Culpose delicten
2. Culpa
 - a. Perbuatanyang dilakukan karena kalalaian/kealpaan
 - b. Perbuatan itu disebut culpose delicten
 - c. Ancaman hukumannya adalah lebih ringan daripada doluse delicten. Antara sengaja insyaf akan kemungkinan (dolus eventualis) dengan culpa lata yang disadari sukar dibedakan.

Van Hattum (Tongat 2009: 294) mengemukakan:

“Seseorang yang bagaimanapun hendak mencapai tujuan yang diperdulukan bahwa orang lain dapat jaga menjadi korban, dan bila akibat itu benar-benar terjadi, maka ia mempunyai gejala insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*)”.

Bilamana seseorang itu dalam berusaha mencapai tujuwa tersebut di atas, insyaf bahwa kemungkinan orang lain dapat menjadi korban, tetapi diharapkannya mudah-mudahan tidak terjadi korban-korban lain dibatasi sedapat mungkin, maka orang yang demikian itu mempunyai culpa lata yang diinsyafi.

Jonkers (M. Asy'ari 2008:24) berpendapat sebagai berikut:

”Dolus eventualisterdapat bilamana pembuat memilih akibat yang diniatkannya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendakinya, daripada sama sekali tidak berbuat sedangkan”

Culpa yang diinsyafi terdapat bilamana pembuat itu lebih suka tidak berbuat daripada terwujud akibat yang dikehendaknya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendaknya. Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas mengenai corak perbedaan antara dolus eventualis, maka menjadi jelas bagi kita akan perbedaan diantara keduanya yakni pada dolus eventualis. Meskipun pelaku menginsyafi akan adanya akibat lain yang kemungkinan akan terjadi bilamana ia melakukan perbuatan itu, namun ada rasa ketidakperdulian akan akibat yang mungkin terjadi. Sedangkan bagi culpa latayang diinsyafi, terdapat bilamana pembuat itu lebih suka untuk tidak berbuat daripada terwujudnya akibat yang tidak dikehendaki.

D. Pengemudi dan kendaraan umum

1. Defenisi pengemudi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti pengemudi diberi batasan sebagai berikut : “pengemudi adalah orang yang (pekerjaannya) mengemudikan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya)”. sedangkan undang undang nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat (23) menentukan bahwa , “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

2. Defenisi kendaraan umum

Kendaraan atau angkutan atau wahana adalah alat transportasi, baik yang di gerakkan oleh mesin, maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bias disebut kendaraan, seperti (gunung es, dan batang pohon yang mengambang).

Kendaraan tidak bermotor dapat juga di gerakkan oleh manusia atau di tarik oleh hewan, seperti gerobak.

Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari guru, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Angkutan umum, khususnya angkutan orang yang diatur dalam keputusan menteri perhubungan KM 68 tahun 1993 yang telah di perbaharui menjadi keputusan menteri perhubungan nomor KM 84 tahun 1999 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dan keputusan menteri perhubungan nomor KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan, secara structural dipisahkan dalam tiga kepentingan, yaitu kepentingan pengguna jasa (masyarakat), penyedia jasa (operator angkutan) dan pemerintah (*regulator*). Namun definisi yang ditetapkan dalam ketentuan hukumnya memperlihatkan keberpihakan kepada operator dengan profit-oriented-nya yaitu angkutan yang di pergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pengertian angkutan dalam keputusan menteri perhubungan nomor KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum adalah angkutan dari pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan pengertiannya adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di gunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.

Sedangkan di dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 41 tahun 1993 menyebutkan bahwa, defenisi dari angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau bahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dan dipungut bayaran.

Keputusan menteri perhubungan nomor KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum defenisinya adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

Undan-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 10 ayat (24) menentukan, “kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang di gunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan di pungut bayaran”.

E. Ketentuan Pidana Perbuatan yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

1. Sengaja menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338 KUHPidana.

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum , maker mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Kejahatan ini dinamakan makat mati atau pembunuhan.

- Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan jiwa (Geestelijkevermogen) dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

- Sengaja

Adanya kesengajaan sebagai niat atau maksud

- Menghilangkan nyawa orang lain

Kesengajaan membunuh (merampas nyawa) orang lain itu dilakukan segera setelah timbul niat sehingga tidak ada waktu untuk berfikir dengan tenang.

2. Penganiayaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Dalam hal ini penganiayaan yang dimaksud adalah dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan menyebabkan perasaan tidak enak, perasaan sakit, menyebabkan luka.

3. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHPidana.

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama - lamanya satu tahun. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati - hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.

4. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 310 UU RI Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum.

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

F. Batas Kecepatan Maksimal dan Minimum Kendaraan Bermotor

Di Indonesia, dalam menentukan seseorang melanggar batas minimum dan maksimum kendaraan bermotor belum didukung oleh fasilitas teknologi yang memadai, akan tetapi dari semua daerah di Indonesia hanya di Jakarta yang mempunyai teknologi untuk mendeteksi kecepatan disebut radar kecepatan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan telah mengatur batas kecepatan kendaraan bermotor sebagai berikut :

Kecepatan Maksimum dan atau Minimum Kendaraan Bermotor

Pasal 80

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam sistem jaringan jalan primer untuk :
 - 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer perjam;
 - 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas III B dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas III C dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk :
 - 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer perjam;
 - 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- e. pada Jalan Kelas III B dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam;
- f. pada Jalan Kelas III C dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

Pasal 81

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 82

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 83

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tidak berlaku.

G. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan

yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan, faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan - alasan lain yang meringankan.

Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua yaitu hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan. Hal - hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab Makassar merupakan salah satu kota besar di kawasan Indonesia Tengah yang tingkat kejadian tindak pidana anaknya menempati urutan XII dari seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan ini pun terjadi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana menyembunyikan orang yang bersalah ini, khususnya jaksa dan hakim yang menangani kasus ini.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diredakan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Dalam penjelasan mengenai perubahan Pasal 359 KUHPidana bahwa sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan matinya orang lain, teristimewa pengemudi kendaraan, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan, terjerumusny kendaraan dalam jurang atau kali, atau tergulingnya kendaraan karena terlampaui banyaknya muatan berupa barang atau karena putus asanya atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan yang semuanya itu mengakibatkan korban jiwa, Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam bentuk kasus sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Putusan pidana No. 1508/Pid.B/2012/PN.Mks tentang sebuah kasus pidana kelalaian kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh seorang supir angkutan umum. Terdakwa dalam kasus ini bernama Samad Bin Kude yang pada hari Minggu tanggal 22 juli 2012 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Bopnto Duri Barat depan TK Lekpera Makassar setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika terdakwa Samad Bin Kude sedang mengemudikan mobil mickrolet No. DD Pol. 1742 Al bergerak dari arah utara ke selatan kemudian belok ke arah timur jalan Bonto Duri Barat pada daerah atau jalan yang diketahui oleh terdakwa jika jalan tersebut sering banyak anak-anak bermain karena terdakwa sering melewati jalan tersebut. Pada saat terdakwa berada di depan TK Olala Lekpera keadaan saat itu sepi sehingga terdakwa yang dalam keadaan lelah, capek setelah bekerja mengendaraai mobil dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga mengakibatkan korban Andi Reifa tergeletak tak sadarkan diri sekitar satu

meter di belakang sebelah kanan mobil pete-pete yang dikemudikan terdakwa. Orang tua korban kemudian mengangkut korban Andi Reifa yang tergeletak dan mengalami luka cedera pada bagian kepala sebelah kanan terkelupas, mulut dan hidung mengeluarkan darah, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke RS Bhayangkara Makassar.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana kelalaian kendaraan bermotor yang menyebabkan matinya orang lain dengan Nomor Register Perkara PDM-553/Mks/Ep/09/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang dilakukan oleh terdakwa Samad Bin Kude oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut ;

- Melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009

Terdakwa Samad Bin Kude yang pada hari Minggu tanggal 22 juli 2012 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di jl. Bopnto Duri Barat depan TK Lekpera Makassar setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seoprang Jaksa Penuntut Umum ibu Nur Fitriaty, SH menerangkan bahwa perkara PDM-553/Mks/Ep/09/2012 penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, dimana dakwaan itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di persidangan.

Untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa. Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 3(tiga) orang saksi dan selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil mickrolet DD 1742 AI warna biru, 1(satu) lembar STNK mobil mickrolet DD 1742 AI dan 1(satu) lembar SIM A umum An, Samad. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut di sertai dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka terdakwa dituntut dengan pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- *Setiap Orang*

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa LK. Samad Bin Kude yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah LK. Samad Bin Kude sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*

Bahwa berdasarkan fakta-akta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Samad Bin Kude yang mengemudikan 1 (satu) Unit mobil mickrolet warna biru No. Pol DD 1742 Al yang bergerak dari arah utara keselatan kemudia ketimur pada jalan Bonto Duri VII Makassar dengan kecepatan

sekitar 10km/jam menggunakan persenelan gigi 1 (satu), seharusnya dalam mengemudikan kendaraannya terdakwa harus mengambil tindakan kehati-hatian karena banyak anak-anak apalagi malam hari, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak memperhatikan di sisi kanan jalan ada korban LK. Andi Reifa Rafansyah yang sedang bermain, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban yang mengakibatkan korban mengalami luka atau cedera pada bagian kepalanya sebelah kanan terkelupas, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri dan korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan kerumah sakit Bhayangkara Makassar.

Hal tersebut didukung pula dengan adanya alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor :VER/12/VII/2012/Rumkit tanggal 23 juli 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Costantinus William Siahaan, yang dalam pemeriksaan terhadap Pr. Andi Reifa Raansyah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara PDM-553/Mks/Ep/09/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Samad Bin Kude, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meniggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samad Bin Kude, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit mickrolet nomor polisi DD 1742 AI dan 1(satu) lembar SIM A umum an. Samad, di kembalikan kepada yang berhak.
4. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Dalam perkara nomor 1508/Pid.B/2012/PN.Mks hakim memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa Samad Bin Kude, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meniggal dunia”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samad Bin Kude, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit mickrolet nomor polisi DD 1742 AI dan 1(satu) lembar SIM A umum an. Samad, di kembalikan kepada yang berhak
5. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Mahyuti, S.H., yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 310 ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan

Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Jan Maanoppo, S.H., M.H., seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim, namun penulis akan mengomentari putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.Mks secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009, yaitu melakukan perbuatan yakni lalai dalam berkendara yang mengakibatkan matinya orang lain.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa Samad Bin Kude, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meniggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samad Bin Kude, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit mickrolet nomor polisi DD 1742 AI dan 1(satu) lembar SIM A umum an. Samad, di kembalikan kepada yang berhak
5. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah :

1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
3. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya;
4. Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;
5. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

a. Saksi Faridah

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang ia ketahui, oleh karena itu saksi sementara duduk di depan TK Olala Lekpera menghadap kejalan bersama sodari Sitti Asmawiyah yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari kejadian perkara.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di hari minggu tanggal 22 juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita di jalan Bonto Duri Barat depan TK Lekpera Makassar.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelekaan lalu lintas adalah angkutan kota warna biru nomor polisi dan pengemudinya saksi tidak ketahui menabrak pejalan kaki saudara Andi Reifa Rafansyah yang berumur 2 tahun.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung saat kejadiannya, saksi hanya mendengar bunyi “PRAKK” dari arah pete-pete saat melintas didepan TK setelah itu saksi melihat korban atau pejalan kaki terbaring di jalan yang berada dibelakang mobil angkutan kota.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil pete-pete bergerak dari arah utara ke selatan kemudian belok kearah timur sedabgkan korban Andi Reifa Rafansyah saksi tidak ketahui bergerak dari arah mana.

- Bahwa setelah mendengar bunyi “PRAKK” dari arah mobil pete-pete yang melintas didepan TK Olala Lekpera dan melihat ada anak kecil terbaring di jalan saksi kemudia meneriaki pengemudi mobil pete-pete dan menyampaikan bahwa kamu menabrak , setelah itu mobil pete-pete dan saksi berlari keluar di jalan dan berteriak “anaknya siapa ?” karena saat itu saksi belum mengenal korban. Setelah itu dating ibunya Andi Reifa Rafansyah kemudian langsung mengangkat anaknya.
- Bahwa posisi mobil pete-pete berhenti ditengah jalan sedangkan Andi Reifa Rafansyah berada sekitar satu meter dari mobil pete-pete sebelah kanan dengan posisi tertidur miring kekanan menghadap mobil pete-pete.

b. Saksi Sitti Asnawiyah dg Mane’neng

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang ia ketahui saat itu saksi sementara duduk didepan TK Olala Lekpera menghadap kerabat bersama saudari Faridah yang berjarak empat meter dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 juli 2012 sekitar jam 19.00 wita di jalan Bonto Duri Barat depan Tk Olala Lekpera Makassar.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelekaan lalu lintas adalah angkutan kota warna biru nomor polisi dan pengemudinya saksi tidak ketahui menabrak pejalan kaki saudara Andi Reifa Rafansyah yang berumur 2 tahun.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung saat kejadiannya, saksi hanya mendengar bunyi “PRAKK” dari arah pete-pete saat melintas didepan TK setelah itu saksi melihat korban atau pejalan kaki terbaring di jalan yang berada dibelakang mobil angkutan kota.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang menjadi korban jiwa adalah saudara Andi Reifa Rafansyah namun saksi tidak mengetahui kondisi cedera atau luka korban secara jelas saksi hanya melihat darah di jalan bekas kepala korban kemudian saksi membersihkannya.
- Bahwa saat itu keadaan cuaca cerah malam hari ada lampu penerangan jalan keadaan jalan paving block kondisi baik, arus lalu lintas sepi, dan tempat kejadian perkara merupakan kawasan padat penduduk dan terdapat banyak anak-anak.
- Bahwa saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, namun saksi membenarkan gambar atau *sketch* TKP.
- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa dan tidak ditekan saat memberikan keterangan didepan penyidik, dan membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara pemeriksaan.

c. Saksi Darmawati Dg Tinggi

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang ia ketahui, oleh karena itu saksi sementara duduk di depan TK Olala Lekpera menghadap kejalan bersama sodari Sitti Asmawiyah yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari kejadian perkara.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di hari minggu tanggal 22 juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita di jalan Bonto Duri Barat depan TK Lekpera Makassar.
- Bahwa saksi itu tidak melihat langsung saat kejadiannya, karena saksi saat itu berada didapur dan hanya mendengar teriakan nama anaknya dari arah jalan, setelah itu saksi bersama suaminya berlari keluar kejalan dan saat itu saksi melihat anaknya terbaring dijalan sebelah kanan sekitar satu meter dibelakang mobil pete-pete, kemudian saksi langsung mengangkat anaknya kemudian dibawa kebidan disekitar kompleks, namun karena tidak bias ditangani saksi mengantar ke RS Bhayangkara.
- Bahwa saat saksi kedapur anaknya masih ada dikamar bersama suaminya
- Saksi menjelaskan posisi mobil pete-pete berhenti ditengah jalan sedangkan anak saksi terbaring di jalan sekitar satu meter dibelakang pete-pete sebelah kanan.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi anak saksi dari pintu pagar rumah sekitar dua meter ke timur.
- Bahwa saat itu keadaan cuaca cerah malam hari ada lampu penerangan jalan keadaan jalan paving block kondisi baik, arus lalu lintas sepi, dan tempat kejadian perkara merupakan kawasan padat penduduk dan terdapat banyak anak-anak.
- Bahwa saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, namun saksi membenarkan gambar atau *sketch* TKP.
- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa dan tidak ditekan saat memberikan keterangan didepan penyidik, dan membenarkan semua keterangannya kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara pemeriksaan.

d. Saksi Andi Chaeruddin Bin A. Parenrengi

- Bahwa saksi tidak melihat saat anak kandungnya mengalami kecelakaan lalu lintas karena saksi berada didalam kamar, saat itu saksi hanya mendengar teriakan saudari Sitti Asnawiyah yang memanggil nama anaknya dari arah jalan, setelah mendengar teriakan tersebut saksi kemudian berlari kejalan.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian, bahwa sebelum terjadi kecelekaan lalu lintas saksi bersama istri saudari Darmawati dan anaknya Andi Reifa Rafansyah sedang makan

di dalam kamar kosnya, saat itu anaknya di suapi istri saksi, setelah makan istrinya habis, istrinya pergi kedapur, namun saat itu anaknya masih dikamar, beberapa saat kemudian saksi melihat anaknya keluar kamar, namun saksi tidak tahu tujuan anaknya saat itu, beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan memanggil nama anaknya dari arah jalan, setelah itu saksi langsung berlari keluar dan mendapati anaknya terbaring di jalan dibelakang sebelah kanan mobil pete-pete yang saat itu anaknya ditolong istri saksi.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang menjadi korban jiwa adalah anak saksi saudara Andi Reifa Rafansyah yang mengalami cedera luka pada bagian kepala sebelah kanan terkelupas, mulut dan hidung mengeluarkan darah tidak sadarkan diri, dan meninggal dunia di TKP.
- Bahwa saksi sempat memandikan dan mensholati mayat anaknya kemudian anaknya dimakamkan pada hari senin tanggal 23 juli 2012 pukul 11.30 wita, pada pemakaman Andi Tonro.
- Bahwa saksi menjelaskan kematian anaknya murni kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak merasa di paksa, di tekan dan tidak di bujuk dalam memberikan keterangannya kepada penidik, dan saksi membenarkan semua keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara pemeriksaan.

6. Hakim mempertimbangkan karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tercela dan bertentangan dengan hukum;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

2. Analisis Penulis

Putusan hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan , melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pembedaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Terhadap perkara no 1508/Pid.B/2012/PN.Mks Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus sesuai fakta persidangan.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani pada kasus ini yaitu Jan Manoppo, SH., MH. Pada tanggal 06 september 2012 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menerangkan bahwa :

“pertanggung jawaban hakim pada putusan itu terbatas hanya pada teknis yuridis, yang meliputi bagaimana hakim mengkaitkan sesuai dengan hukum acara pidana, apabila tidak terpenuhi maka putusan itu batal demi hukum, begitu pula pada kasus kelalaian ini. Harus memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana yang terdapat pada pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009.”

Penjatuhan pidana pada kasus ini selama 4 (empat) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu selama 6(enam) bulan dikarenakan hakim mempertimbangkan adanya kesepakatan damai antara terdakwa dan keluarga korban dan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Hukuman yang di berikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari hukuman maksimal dalam pasal 310 ayat (4) tahun 2009, dengan pertimbangan pada berita acara pemeriksa/ olah kasus oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pembedaan yang dilakukan oleh hakim menurut penulis sudah tepat karena sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, hal ini bias kita lihat pada vonis yang diberikan kepada terdakwa yang ringan dikarenakan banyak pertimbangan yang meringankan terdakwa sehingga terdakwa dihukum hanya selama 4 bulan penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang dalam perkara putusan nomor 1508/Pid.B/2012/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 310 ayat (4) (empat) UU No. 22 tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan nomor 1508/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya

pertimbangan-pertimbangan yuridis yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas
2. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu didampingi oleh penasehat hukum.
3. Kewaspadaan orang tua dalam mengawasi anak-anak perlu di tingkatkan agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti pada kasus ini, mengingat makin meningkatnya jumlah kendaraan yang berada di jalan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1986. *Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jogjakarta
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- , 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Hariwijaya. 2006. *Pedoman Teknis Penulisan Karya Ilmiah*. Citra Pustaka. Jogjakarta
- Muhari Agus Santoso. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN – UMI. Ujung Pandang.
- , 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi UNHAS. Ujung Pandang.
- Yan Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang
- Kitab undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang

Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang angkutan jalan dan lalu lintas.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan>

news.liputan6.com/read/352399/pemerintah-dinilai-tak-serius-program-zero-accident